



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021
Bagian Anggaran 005.01.0500.526767**

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semabung, Gedangan

Sidoarjo - Jawa Timur 61254

Telp. 031-8683141

e-mail : ptunsby_keuangan@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semabung, Gedangan

Telp. 031-8683114

Sidoarjo - Jawa Timur 61254

e-mail : ptunsby_keuangan@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 11 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



DJOKO PRIJONO, S.E.

NIP. 19710526 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
RINGKASAN	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	x
NERACA.....	xi
LAPORAN OPERASIONAL.....	xii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi.....	4
A.5. Dasar Pengukuran.....	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang.....	16
B.4 Belanja Modal.....	17
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18

B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	19
C.7 Persediaan	19
C.8 Tanah	20
C.9 Peralatan dan Mesin	23
C.10 Gedung dan Bangunan	24
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	25
C.12 Aset Tetap Lainnya	26
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan	26
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
C.17 Aset Tak Berwujud	27
C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
C.20 Utang kepada Pihak Ketiga	28
C.22 Uang Muka dari KPPN	29
C.23 Ekuitas	29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	30
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	30
D.2 Beban Pegawai	30
D.3 Beban Persediaan	31
D.4 Beban Barang dan Jasa	31
D.5 Beban Pemeliharaan	32
D.6 Beban Perjalanan Dinas	33
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	33
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	34

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	35
E.1 Ekuitas Awal	35
E.2 Defisit LO	35
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	35
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	35
E.5 Koreksi Lain-lain.....	35
E.6 Transaksi Antar Entitas	35
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	36
E.6.2 Transfer masuk.....	36
E.7 Ekuitas Akhir.....	36
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	37
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	37
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	37
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	37
F.3.1. Rekening Pemerintah	37
F.3.2. DIPA Awal dan DIPA Revisi	38
F.3.3. Penjelasan Jurnal Bantu	44
F.3.4. Koreksi Data SPM.....	44
F.3.5. SK Pengelola Keuangan.....	47
Lampiran A.1. Tabel Penyusutan Semester II TA. 2020	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi Pendapatan dan Anggaran Awal TA. 2021.....	132
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 3. Perbandingan Realisasi PNBPN TA. 2021 dan TA. 2020.....	13
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2021.....	14
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2021 dan TA. 2020	15
Tabel 6. Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2021 dan TA. 2020	16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Barang TA. 2021 dan TA. 2020	16
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal TA. 2021 dan TA. 2020	17
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020	17
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 dan TA. 2020.....	18
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA. 2021 dan TA. 2020	18
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .	19
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	19
Tabel 14. Rincian Persediaan.....	20
Tabel 15. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2021	20
Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	27
Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
Tabel 18. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	28
Tabel 19. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	30
Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	31
Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	31
Tabel 22. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	32
Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	32
Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	33
Tabel 25. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	33
Tabel 26. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	34

Tabel 27. Rincian Kegiatan Non Operasional.....	34
Tabel 28. Transaksi Antar Entitas.....	36
Tabel 29. Dipa Awal Tahun Anggaran 2021.....	38
Tabel 30-34. Revisi Dipa Tahun Anggaran 2021 Ke- 1 s/d Ke-4.....	39-43
Lampiran A-1 Tabel Penyusutan Tahun Anggaran 2021.....	44

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan

Telp. (031) 8683141, 8683114 Faximile : (031) 8683142

Website : www.ptun-surabaya.go.id, Email : ptunsby_keuangan@yahoo.com

S I D O A R J O - 6 1 2 5 4

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 11 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



DJOKO PRIJONO, S.E.

NIP. 19710526 199103 1 002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.427.500,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 6.245.000,00 atau mencapai 54,88 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2021 adalah sebesar Rp. 11.989.492.579,00 atau mencapai 99,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 12.098.607.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11.492.394.163,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 11.066.544.658,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 425.849.505,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 19.218.464,00 dan Rp. 11.473.175.699,00. Sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 11.492.394.163,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.427.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 12.165.610.351,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 12.162.182.851,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. 12.162.182.851,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 11.649.103.471,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 12.162.182.851,00, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp. 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 11.986.255.079,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 11.473.175.699,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021			TA 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	6.245.000,00	3.427.500,00	54,88	5.100.000,00	5.015.240,00	98,34
Jumlah Pendapatan		6.245.000,00	3.427.500,00	54,88	5.100.000,00	5.015.240,00	98,34
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	10.154.509.000,00	10.110.966.364,00	99,57	9.099.532.000,00	9.084.342.722,00	99,83
2. Belanja Barang	B.3	1.679.098.000,00	1.614.086.215,00	96,13	1.511.052.000,00	1.456.260.014,00	96,37
3. Belanja Modal	B.4	265.000.000,00	264.440.000,00	99,79	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja		12.098.607.000,00	11.989.492.579,00	99,10	10.635.584.000,00	10.565.602.736,00	99,34

NERACA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
NERACA
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 7	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
Aset Tetap			
Tanah	C. 8	3.240.115.000	3.240.115.000
Peralatan dan Mesin	C. 9	3.040.270.637	2.786.755.637
Gedung dan Bangunan	C. 10	8.544.455.000	9.058.667.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 11	132.750.000	132.750.000
Aset Tetap Lainnya	C. 12	190.000	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 13	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 14	(3.891.235.979)	(3.555.410.634)
Jumlah Aset Tetap		11.066.544.658	11.662.877.003
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 17	-	-
Aset Lain-Lain	C. 18	642.246.408	125.359.408
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 19	(216.396.903)	(125.359.408)
Jumlah Aset Lainnya		425.849.505	-
JUMLAH ASET		11.492.394.163	11.662.877.003
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 20	19.218.464	13.773.532
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 21	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 22	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19.218.464	13.773.532
JUMLAH KEWAJIBAN		19.218.464	13.773.532
EKUITAS			
Ekuitas	C. 23	11.473.175.699	11.649.103.471
JUMLAH EKUITAS		11.473.175.699	11.649.103.471
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.492.394.163	11.662.877.003

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		3.427.500	5.015.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	3.427.500	5.015.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	10.110.966.364	9.084.342.722
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	35.447.900	39.562.500
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	1.341.762.002	1.147.732.390
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	241.032.825	256.726.871
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	9.538.420	9.722.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	426.862.840	438.710.188
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		12.165.610.351	10.976.796.671
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.162.182.851)	(10.971.781.671)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		-	240
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		-	1.520.900
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.521.140
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	168.246
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		-	1.095.775
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya		-	1.095.775
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	425.365
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	425.365
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(12.162.182.851)	(10.971.356.306)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	3
EKUITAS AWAL	E. 1	11.649.103.471,00	12.236.498.160,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(12.162.182.851,00)	(10.971.356.306,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	(176.625.879,00)
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	(194.135.000,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	17.509.121,00
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	11.986.255.079,00	10.560.587.496,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(175.927.772,00)	(587.394.689,00)
EKUITAS AKHIR	E. 7	11.473.175.699,00	11.649.103.471,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Tata Usaha
Negara
Surabaya*

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Tahun 2021 merupakan bagian dari Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang untuk jangka waktu yang panjang yaitu 25 tahun kedepan yang diharapkan untuk menjadi langkah besar untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita.

Dengan adanya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini, Mahkamah Agung berharap proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Selain itu Mahkamah Agung berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama stakeholders lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

Dan sejak beberapa tahun ini pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Berikut Visi Mahkamah Agung adalah “**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DAN MODERN**”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yang Modern Dan Wibawa”.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

1. Melaksanakan Hukum yang berkeadilan.
2. Melaksanakan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi yang berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan tertib administrasi perkara dan administrasi umum berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peradilan yang modern.
4. Menciptakan aparatur pengadilan yang berintegritas dan bertanggung jawab.
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akrual

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang merupakan entitas pelaporan dari Mahkamah Agung RI. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp. 1.000.000** (satu juta rupiah) berdasarkan **PMK Nomor 181/PMK.06/2016**;
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan **PMK Nomor 181/PMK.06/2016**;;
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban*Kebijakan**Akuntansi**atas**Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan oleh adanya revisi dari pusat BA-BUN. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Tabel 1. Rincian Estimasi Pendapatan dan Anggaran Awal Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021	
	Estimasi Pendapatan / Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	6.245.000	6.245.000
Jumlah Pendapatan	6.245.000	6.245.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.284.909.000	10.154.509.000
Belanja Barang	1.576.038.000	1.679.098.000
Belanja Modal	265.000.000	265.000.000
Jumlah Belanja	10.125.947.000	12.098.607.000

*Realisasi**Pendapatan**Rp.3.427.500,00***B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.427.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.245.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2021		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.245.000,00	3.427.500,00	54,88
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		6.245.000,00	3.427.500,00	54,88
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		6.245.000,00	3.427.500,00	54,88

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.587.740,00 atau -31,66 persen dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan pembayaran sewa tanah, gedung dan bangunan pada rumah dinas berkurang karena banyak Pejabat Negara yang telah pindah kost atau kontrak rumah sesuai dengan program dari Mahkamah Agung R.I.;

Perbandingan realisasi PNBP TA. 2021 dan TA. 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Perbandingan Realisasi PNBP TA. 2021 dan TA. 2020

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA. 2021	TA. 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.427.500,00	5.015.000,00	(1.587.500,00)	(31,66)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	240,00	(240,00)	(100,00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Netto		3.427.500,00	5.015.240,00	(1.587.740,00)	(31,66)

Realisasi

Belanja

Negara Rp.

11.989.492.579,00

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 11.989.492.579,00 atau 99,10 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 12.098.607.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2021*(dalam rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	10.154.509.000,00	10.111.151.646,00	99,57
52	Belanja Barang	1.679.098.000,00	1.614.086.215,00	96,13
53	Belanja Modal	265.000.000,00	264.440.000,00	99,79
Jumlah Belanja Bruto		12.098.607.000,00	11.989.677.861,00	99,10
Pengembalian Belanja		-	(185.282,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto		12.098.607.000,00	11.989.492.579,00	99,10

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.423.889.843,00 atau sebesar 13,48 % dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2021 dan TA. 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	10.110.966.364,00	9.084.342.722,00	1.026.623.642,00	11,30
52	Belanja Barang	1.614.086.215,00	1.456.260.014,00	157.826.201,00	10,84
53	Belanja Modal	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76
Jumlah Belanja Netto		11.989.492.579,00	10.565.602.736,00	1.423.889.843,00	13,48

B.2 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp.10.110.966.364
,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.110.966.364,00 dan Rp. 9.084.342.722,00 Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.026.623.642,00 atau 11,30 % dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai khususnya Pejabat Negara yaitu Para Hakim sehingga total jumlah Hakim menjadi 23 orang yang sangat mempengaruhi realisasi tunjangan jabatan menjadi lebih banyak.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2021 dan TA. 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.243.054.380,00	3.060.343.720,00	182.710.660,00	5,97
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.848,00	40.113,00	(265,00)	(0,66)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	218.372.076,00	211.203.170,00	7.168.906,00	3,39
Belanja Tunj. Anak PNS	69.070.560,00	66.932.126,00	2.138.434,00	3,19
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	39.780.000,00	540.000,00	1,36
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.191.060.000,00	4.510.415.000,00	680.645.000,00	15,09
Belanja Tunj. PPh PNS	638.867.582,00	546.772.005,00	92.095.577,00	16,84
Belanja Tunj. Beras PNS	165.154.200,00	136.307.820,00	28.846.380,00	21,16
Belanja Uang Makan PNS	532.328.000,00	498.674.000,00	33.654.000,00	6,75
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.885.000,00	14.245.000,00	(1.360.000,00)	(9,55)
Realisasi Belanja Bruto	10.111.151.646,00	9.084.712.954,00	1.026.438.692,00	11,30
Pengembalian	(185.282,00)	(370.232,00)	184.950,00	(49,96)
Realisasi Belanja Netto	10.110.966.364,00	9.084.342.722,00	1.026.623.642,00	11,30

B.3 Belanja Barang

Belanja

Barang

Rp. 1.614.086.215,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.614.086.215,00 dan Rp. 1.456.260.014,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp. 157.826.201,00 atau 10,84 % dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan terutama adanya kenaikan pada belanja barang operasional.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Perbandingan Belanja Barang TA. 2021 dan TA. 2020 (dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	751.499.280,00	738.039.954,00	13.459.326,00	1,82
Belanja Barang Non Operasional	4.950.000,00	-	4.950.000,00	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan	48.518.630,00	49.549.547,00	(1.030.917,00)	100,00
Belanja Jasa	571.617.790,00	412.633.814,00	158.983.976,00	38,53
Belanja Pemeliharaan	227.962.095,00	246.314.699,00	(18.352.604,00)	(7,45)
Belanja Perjalanan Dinas	9.538.420,00	9.722.000,00	(183.580,00)	(1,89)
Realisasi Belanja Bruto	1.614.086.215,00	1.456.260.014,00	157.826.201,00	10,84
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.614.086.215,00	1.456.260.014,00	157.826.201,00	10,84

Belanja

Modal

Rp.264.440.000,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 264.440.000,00 dan Rp. 25.000.000,00.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal TA. 2021 dan TA. 2020*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 264.440.000,00 dan Rp. 25.000.000,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola T	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	264.440.000,00	25.000.000,00	239.440.000,00	957,76

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2020 dan TA. 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA. 2021 dan TA. 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2021	TA. 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Uang Persediaan per 31 Desember 2021	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp. 0,00

C.2. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	-	-	-
	JUMLAH	-	-

C.7. Persediaan

Persediaan
Rp. 0,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	-	-	-
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Tanah

Rp.

3.240.115.000,00

C.8. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.240.115.000,00 dan Rp. 3.240.115.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	3.240.115.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	3.240.115.000,00

Tabel Tabel 15. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2021

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo	Gedung Kantor PTUN Surabaya yg lama, Jl. Letjend Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo	Pemerintah RI. CQ. Mahkamah Agung RI.	2.160	3.240.115.000,00
Jumlah Halaman I					2.160	3.240.115.000,00

Ringkasan / Kronologis perubahan Nilai Perolehan Aset Tanah :

1. Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah sejak Periode Pelaporan per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 115.000 dari Tahun Anggaran 2015 yang berasal dari Belanja Modal Balik Nama Sertipikat Tanah dari atas nama Departemen Kehakiman menjadi atas nama Pemerintah R.I. CQ. Mahkamah Agung R.I. melalui SPM dengan No. SPM 00061 tanggal 08 September 2016 dengan No. SP2D 161651301007353 tanggal 09 September 2016.

Berdasarkan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa penyusutan tersebut tidak berlaku pada asset-aset dibawah ini :

1. Aset Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Maka berdasarkan PMK tersebut diatas Nilai Aset Tanah tidak mengalami Akumulasi Penyusutan sehingga nilai tanah tersebut tetap dan tidak mengalami perubahan nilai yaitu sebesar Rp.3.240.115.000. Aset tanah sebesar Rp.3.240.115.000,- tersebut merupakan aset tanah yang berada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang diatasnya berdiri Bangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang lama.

Dengan Kondisi bahwa sertipikat tanah tersebut per 31 Desember 2016 telah di Balik Nama dari atas nama Departemen Kehakiman menjadi Pemerintah R.I. CQ. Mahkamah Agung R.I. Dan pada Bulan Juli Tahun 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah berpindah ke Gedung yang baru yang berlokasi di Jl Raya Ir. H. Juanda No. 89 Semambung Gedangan Sidoarjo. Dilokasi tersebut, dengan luas tanah sebesar 11.000 M2, saat ini telah berdiri 3 (tiga) Gedung Bangunan Pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sertipikat Tanah 3 (tiga) Gedung Baru tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung R.I. dan untuk pencatatan Aset Tanah 3 (tiga) Gedung Baru tersebut saat ini masih dicatat pada Aplikasi Simak BMN Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Sehingga tidak dicantumkan pada Aset Tanah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Kemudian per Tahun Anggaran 2017 tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
3. Setelah itu per Tahun Anggaran 2018 juga tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
4. Selanjutnya per Tahun Anggaran 2019 ini juga tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
5. Selanjutnya per Tahun Anggaran 2020 ini juga tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
6. Selanjutnya per Tahun Anggaran 2021 ini juga tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :

C.9. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp.
3.040.270.637,
00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 3.040.270.637,00 dan Rp. 2.786.755.637,00, terjadi kenaikan sebesar Rp. 253.515.000,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	2.786.755.637
Pembelian	264.440.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	190.000
Jumlah Mutasi Tambah	264.630.000
Transfer Keluar	-
Penghapusan	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	11.115.000
Jumlah Mutasi Kurang	11.115.000
Jumlah Mutasi	253.515.000
Saldo per 31 Desember 2021	3.040.270.637
Akumulasi Penyusutan	(2.680.803.217)
Nilai Buku	359.467.420

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2021 berupa pembelian 3 (tiga) Unit PC Kepaniteraan dengan nilai total sebesar Rp. 37.290.000,- yang telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS Nomor : 00048 tanggal 08 Juni 2021, dengan Nomor SP2D 211651303001492 tanggal 09 Juni 2020;
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2021 berupa pembelian 1 (satu) Unit Mesin Antrian Sidang dengan nilai total sebesar Rp. 27.400.000,- yang telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS Nomor : 00065 tanggal 16 Agustus 2021, dengan Nomor SP2D 211651302005012 tanggal 18 Agustus 2021;

3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2021 berupa Ruang Sidang Online dengan nilai total sebesar Rp. 199.750.000,- yang telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS Nomor : 00079 tanggal 28 September 2021, dengan Nomor SP2D 211651301008147 tanggal 30 September 2021;

Gedung dan
Bangunan
Rp.
8.544.455.000,0
0

C.10. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 8.544.455.000,00 dan Rp. 9.058.667.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	9.058.667.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	(514.212.000,00)
Jumlah Mutasi	(514.212.000,00)
Saldo per 31 Desember 2021	8.544.455.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.163.216.099,00)
Nilai Buku	7.381.238.901,00

Ringkasan / Kronologis perubahan Nilai Perolehan :

- Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan dikarenakan adanya Inventarisasi dan Penilaian dari KPKNL Sidoarjo per Bulan Oktober Tahun 2017 dengan Koreksi Nilai Sebesar (Rp. 348.140.605) sehingga Nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2017 senilai Rp. 9.600.942.605 menjadi senilai Rp. 9.252.802.000.
- Kemudian per Tahun Anggaran 2018 tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 tetap senilai Rp. 9.252.802.000,- :
- Selanjutnya per Tahun Anggaran 2019 juga tidak perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 tetap senilai Rp. 9.252.802.000, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 2 (dua) Unit Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya baik yang berada di Gedung Lama di Jl. Letjen Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo maupun di Gedung Baru di Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89 Semabung Gedangan Sidoarjo, total nilai gedung keduanya sebesar Rp. 7.840.214.000.

2. 1 (satu) Unit Bangunan Musholla yang berada di lokasi yang lama di Jl. Letjen Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo dengan nilai sebesar Rp. 89.739.000.
3. 2 (dua) Unit Rumah Dinas Golongan I Tipe B Permanen yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 350.198.000.
4. 9 (sembilan) Unit Rumah Dinas Golongan I Tipe C Permanen dengan rincian 8 (delapan) Unit berlokasi di Kompleks Medaeng Waru Sidoarjo dan 1 (satu) unit berlokasi Jl. Siwalankerto Surabaya dengan nilai total sebesar Rp. 890.899.000.
5. 1 (satu) Unit Rumah Dinas Golongan I Tipe E Permanen yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 63.834.000
6. Reklas Masuk berupa Pagar Permanen dari Reklas Keluar Irigasi sebesar Rp. 88.342.200. yang berlokasi di di Gedung Lama di Jl. Letjen Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo yang telah disusutkan dengan nilai akhir sebesar Rp. 17.918.000

Ke 12 (dua belas) Rumah Dinas tersebut sampai saat ini Sertipikat Tanahnya masih dipegang dan atas nama Departemen Kehakiman.

Para Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah berkali-kali berusaha untuk mengajukan balik nama sertipikat tersebut namun sampai saat ini terkendala dengan aturan pada Departemen Kehakiman yang belum memungkinkan untuk hal itu.

- Pada periode 31 Desember 2020 telah terjadi Mutasi Tambah sebesar Rp. 10.714.000,- dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 204.849.000,-
Hal ini disebabkan karena adanya Koreksi Revaluasi BMN di Tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Mutasi Tambah pada Akun Pagar dengan Nilai Rp. 10.714.000.-
 2. Mutasi Kurang pada Bangunan Gedung Kantor dengan Nilai Rp. 36.341.000,-
 3. Mutasi Kurang pada Bangunan Gedung Tempat Ibadah dengan Nilai Rp. 50.743.000,-
 4. Mutasi Kurang pada Rumah Negara Golongan I dengan Nilai Rp. 117.765.000.000,-

Jalan, Irigasi

dan Jaringan Rp.

132.750.000,00

C.11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 132.750.000,00 dan Rp. 132.750.000,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	132.750.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2021	132.750.000,00
Akumulasi Penyusutan	(47.216.663,00)
Nilai Buku	85.533.337,00

C.12. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp.

425.849.505,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 425.849.505,00 dan Rp. 0,00.

Mutasi nilai Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	642.246.408,00
Jumlah Mutasi Kurang	642.246.408,00
Jumlah Mutasi	(642.246.408,00)
Saldo per 31 Desember 2021	642.246.408,00
Akumulasi Penyusutan	(216.396.903,00)
Nilai Buku	425.849.505,00

C.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp. 0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah :

Saldo per 31 Desember 2020	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Akumulasi**Penyusutan****Aset Tetap Rp.**

3.891.235.979,00

C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. 3.891.235.979,00 dan Rp. 3.555.410.634,00, terjadi kenaikan sebesar Rp. 335.825.345 atau 9,44 %.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.040.270.637	(2.680.803.217)	359.467.420
2	Gedung dan Bangunan	8.544.455.000	(1.163.216.099)	7.381.238.901
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.750.000	(47.216.663)	85.533.337
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		11.717.475.637	(3.891.235.979)	7.826.239.658

C.17. Aset Tak Berwujud**Aset Tak****Berwujud**

Rp. 0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp.
216.396.903,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp. 216.396.903,00) dan (Rp. 125.359.408,00).

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	642.246.408,00	(216.396.903,00)	425.849.505,00
Jumlah		642.246.408,00	(216.396.903,00)	425.849.505,00

C.20. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.
19.218.464,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.218.464,00 dan Rp. 13.773.532,00 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 18. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Beban Keperluan Perkantoran	530.500	Tagihan Internet Bulan Desember 2021
2	Beban Langganan Listrik	17.680.589	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021
3	Beban Langganan Telepon	359.075	Tagihan Telepon Bulan Desember 2021
4	Beban Langganan Air	648.300	Tagihan Air Bulan Desember 2021
		19.218.464,00	

C.22. Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN Rp. 0,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.23. Ekuitas

Ekuitas Rp.
11.473.175.699,00

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.473.175.699,00 dan Rp. 11.649.103.471,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNB
Rp.3.427.500,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.427.500,00 dan Rp. 5.015.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 19. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	3.427.500,00	5.015.000,00	(31,66)
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		3.427.500,00	5.015.000,00	(31,66)
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	-
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	-
Total		3.427.500,00	5.015.000,00	(31,66)

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa gedung dan bangunan pada Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Sewa Tanah untuk Koperasi Pegawai KPRI PTUN Surabaya.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.
10.110.966.364,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.110.966.364,00 dan Rp. 9.084.342.722,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	3.243.054.380,00	3.060.343.720,00	5,97
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	39.566,00	39.881,00	(0,79)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	218.372.076,00	211.203.170,00	3,39
4	Beban Tunj. Anak PNS	69.070.560,00	66.932.126,00	3,19
5	Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	39.780.000,00	1,36
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.191.060.000,00	4.510.415.000,00	15,09
7	Beban Tunj. PPh PNS	638.867.582,00	546.772.005,00	16,84
8	Beban Tunj. Beras PNS	165.154.200,00	136.307.820,00	21,16
9	Beban Uang Makan PNS	532.328.000,00	498.674.000,00	6,75
10	Beban Tunjangan Umum PNS	12.700.000,00	13.875.000,00	(8,47)
Total		10.110.966.364,00	9.084.342.722,00	11,30

D.3. Beban PersediaanBeban Persediaan
Rp. 35.447.900,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.447.900,00 dan Rp. 39.562.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

**Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	35.447.900,00	39.562.500,00	(10,40)
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
Total		35.447.900,00	39.562.500,00	(10,40)

D.4. Beban Barang dan JasaBeban Barang dan
Jasa
Rp. 1.341.762.002,00

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.341.762.002,00 dan Rp. 1.147.732.390,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	583.266.630,00	588.575.787,00	(0,90)
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.956.700,00	6.185.300,00	(3,70)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50.160.000,00	48.960.000,00	2,45
4	Beban Barang Operasional Lainnya	90.476.700,00	59.201.554,00	52,83
5	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-18	21.639.250,00	34.963.313,00	(38,11)
6	Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-18	4.950.000,00	0,00	-
7	Beban Langganan Listrik	176.263.778,00	167.682.156,00	5,12
8	Beban Langganan Telepon	3.782.744,00	4.217.714,00	(10,31)
9	Beban Langganan Air	6.789.500,00	8.494.900,00	(20,08)
10	Beban Sewa	390.226.700,00	229.451.666,00	70,07
11	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	0,00	-
Total		1.341.762.002,00	1.147.732.390,00	16,91

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan

Rp. 241.032.825,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 241.032.825,00 dan Rp. 256.726.871,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107.971.527,00	95.481.102,00	13,08
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid - 19	0,00	3.509.500,00	-
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	12.389.000,00	24.333.400,00	(49,09)
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107.601.568,00	122.990.697,00	(12,51)
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	13.070.730,00	10.412.172,00	25,53
Total		241.032.825,00	256.726.871,00	(6,11)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 9.538.420,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.538.420,00 dan Rp. 9.722.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	8.938.420,00	9.272.000,00	(3,60)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	600.000,00	450.000,00	33,33
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0,00	0,00	-
Total		9.538.420,00	9.722.000,00	(1,89)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 426.862.840,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 426.862.840,00 dan Rp. 438.710.188,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 25. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	144.617.598,00	156.464.944,00	(7,57)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	258.492.466,00	278.128.578,00	(7,06)
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	4.116.666,00	4.116.666,00	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	19.636.110,00	0,00	-
Total		426.862.840,00	438.710.188,00	(2,70)

0

D.8 Surplus dari Kegiatan OperasionalSurplus/(Defisit) dari
Kegiatan

Pos Surplus dari Kegiatan Operasional berasal dari Jumlah Beban Operasional.

Operasional Rp.

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada

(12.165.610.351,00)

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 26. Rincian Kegiatan Operasional
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Surplus Kegiatan Operasional	12.162.182.851,00	10.971.781.671,00	10,85
Total		(12.162.182.851,00)	(10.971.781.671,00)	(10,85)

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional Rp.0,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 27. Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional				
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	240,00	(100,00)
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	1.520.900,00	(100,00)
Total		-	1.521.140,00	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	1.095.775,00	(100,00)
Total		-	1.095.775,00	(100,00)
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	425.365,00	(100,00)

*Ekuitas Awal**Rp.**11.649.103.471,00***E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.649.103.471,00 dan Rp. 12.236.498.160,00.

*Surplus / (Defisit)-**LO**(Rp.**12.162.182.851,**00)***E.2. Surplus/ (Defisit)-LO**

Jumlah Surplus/ (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp. 12.162.182.851,00) dan (Rp. 10.971.356.306,00). Surplus/ (Defisit)-LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

*Selisih Revaluasi**Aset Tetap**(Rp. 0,00)***E.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,00 dan (Rp. 194.135.000,00).

*Koreksi Nilai Aset**Tetap Non**Revaluasi**Rp. 0,00***E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 17.509.121,00.

*Koreksi lain-lain**Rp. 0,00***E.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

No	Uraian	Jumlah
1		-
Total		-

*Transaksi Antar**Entitas**Rp.**11.986.255.079,**00***E.6. Transaksi Antar Entitas**

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.986.255.079,00 dan Rp. 10.560.587.496,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 28. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.989.492.579,00
Diterima dari Entitas Lain	(3.427.500,00)
Transfer Masuk	190.000,00
Pengesahan Hibah Langsung	-
	11.986.255.079,00

DDEL / DKEL

(Rp.3.427.500,00)

dan

11.989.492.579,00

E.6.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp. 3.427.500,00) sedangkan DKEL sebesar Rp. 11.989.492.579,00. Sedangkan pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar (Rp. 5.015.240,00) sedangkan DKEL sebesar Rp. 10.565.602.736,00.

Transfer Masuk

Rp. 0,00

E.6.2. Transfer masuk

Transfer Masuk merupakan penerimaan aset dari hasil kiriman (satker lainnya) dalam lingkup Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 190.000,00 dan Rp. 0,00.

Ekuitas Akhir

Rp.

11.473.175.699,00

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.473.175.699,00 dan Rp. 11.649.103.471,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2021.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2021

Tidak terdapat Pemeriksaan BPK RI pada Tahun Anggaran 2021.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain**F.3.1. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah:

1. REKENING VIRTUAL pada **Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Gedung BRI 1 Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 44- 46, Jakarta 10210** dengan Nomor Rekening : **653245267671000 a.n. BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526767** yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI dengan **saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.**

- Rekening tersebut sebagai pengganti rekening yang lama pada BRI CABANG SURABAYA JEMURSARI A/C 0412-01-000333-30-5 a.n. BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526767 yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebelumnya dengan Surat Penutupan Rekening Nomor : B.1117-IX/KC/OPS/05/2021 tanggal 03 Mei 2021.

F.3.2. REVISI DIPA 01**1. Revisi DIPA**

DIPA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2021 dengan nomor : SP DIPA-005-01-2-526767/2021 tanggal 23 Nopember Tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 10.125.947.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Dipa Awal Tahun Anggaran 2021
a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01			
1066.EAA	1.	511111	2.394.735.000
	2.	511119	50.000
	3.	511121	179.084.000
	4.	511122	53.991.000
	5.	511123	40.320.000
	6.	511124	4.120.690.000
	7.	511125	716.582.000
	8.	511126	146.978.000
	9.	511129	571.824.000
	10.	511151	60.655.000
	11.	521111	596.104.000
	12.	521114	6.300.000
	13.	521115	57.960.000
	14.	521119	38.190.000
	15.	521131	4.000.000
1066.EAC	16.	521241	5.000.000
	17.	521811	47.040.000
	18.	521841	3.334.000
	19.	522111	180.300.000
	20.	522112	18.000.000
	21.	522113	14.400.000
	22.	522141	336.960.000
	23.	523111	80.000.000
	24.	523119	24.500.000
	25.	523121	107.380.000
	26.	524111	44.846.000
	27.	524113	4.800.000
	28.	524119	6.924.000
005.01.02			
1071.EAD	29.	532111	265.000.000
	Total		10.125.947.000,00

b. Revisi DIPA Ke-1 (Tanggal 19 April 2021)

Tidak terdapat perubahan (penambahan) nilai pagu pada Revisi DIPA 1. Revisi dilakukan karena adanya perubahan kode lokasi pembayaran dari 05.51 (Kota Surabaya) menjadi 05.03 (Kabupaten Sidoarjo) pada klasifikasi Rincian Output (KRO) 1071.EAD yaitu Layanan Sarana Internal.

Tabel 29. Revisi Dipa TA. 2021 Ke-1

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp) Dipa Awal	Menjadi (Rp)
005.01.01				
1066.EAA	1.	511111	2.394.735.000	2.394.735.000
	2.	511119	50.000	50.000
	3.	511121	179.084.000	179.084.000
	4.	511122	53.991.000	53.991.000
	5.	511123	40.320.000	40.320.000
	6.	511124	4.120.690.000	4.120.690.000
	7.	511125	716.582.000	716.582.000
	8.	511126	146.978.000	146.978.000
	9.	511129	571.824.000	571.824.000
	10.	511151	60.655.000	60.655.000
	11.	521111	596.104.000	596.104.000
	12.	521114	6.300.000	6.300.000
	13.	521115	57.960.000	57.960.000
	14.	521119	38.190.000	38.190.000
	15.	521131	4.000.000	4.000.000
1066.EAC	16.	521241	5.000.000	5.000.000
	17.	521811	47.040.000	47.040.000
	18.	521841	3.334.000	3.334.000
	19.	522111	180.300.000	180.300.000
	20.	522112	18.000.000	18.000.000
	21.	522113	14.400.000	14.400.000
	22.	522141	336.960.000	336.960.000
	23.	523111	80.000.000	80.000.000
	24.	523119	24.500.000	24.500.000
	25.	523121	107.380.000	107.380.000
	26.	524111	44.846.000	44.846.000
	27.	524113	4.800.000	4.800.000
	28.	524119	6.924.000	6.924.000
005.01.02				
1071.EAD	29.	532111	265.000.000	265.000.000
	Total		10.125.947.000,00	10.125.947.000,00

c. Revisi DIPA Ke-2 (Tanggal 02 Juli 2021)

Terdapat penambahan nilai pagu pada Revisi DIPA 2 ini dan Revisi juga dilakukan karena adanya pergeseran diantara mata anggaran.

Tabel 30. Revisi Dipa TA. 2021 Ke-2

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp) Dipa Awal	Menjadi (Rp)
005.01.01				
1066.EAA	1.	511111	2.394.735.000	2.394.735.000
	2.	511119	50.000	50.000
	3.	511121	179.084.000	179.084.000
	4.	511122	53.991.000	53.991.000
	5.	511123	40.320.000	40.320.000
	6.	511124	4.120.690.000	4.120.690.000
	7.	511125	716.582.000	716.582.000
	8.	511126	146.978.000	146.978.000
	9.	511129	571.824.000	571.824.000
	10.	511151	60.655.000	60.655.000
	11.	521111	596.104.000	588.310.000
	12.	521114	6.300.000	6.300.000
	13.	521115	57.960.000	50.172.000
	14.	521119	38.190.000	61.999.000
	15.	521131	4.000.000	8.130.000
1066.EAC	16.	521241	5.000.000	5.000.000
	17.	521811	47.040.000	47.040.000
	18.	521841	3.334.000	6.772.000
	19.	522111	180.300.000	180.300.000
	20.	522112	18.000.000	18.000.000
	21.	522113	14.400.000	14.400.000
	22.	522141	336.960.000	414.720.000
	23.	523111	80.000.000	103.000.000
	24.	523119	24.500.000	15.120.000
	25.	523121	107.380.000	112.632.000
	26.	524111	44.846.000	19.500.000
	27.	524113	4.800.000	2.400.000
	28.	524119	6.924.000	3.000
005.01.02				
1071.EAD	29.	532111	265.000.000	265.000.000
	Total		10.125.947.000,00	10.203.707.000,00

d. Revisi DIPA Ke-3 (Tanggal 19 Oktober 2021)

Tidak terdapat perubahan (penambahan) nilai pagu pada Revisi DIPA 3. Revisi dilakukan karena adanya pergeseran diantara mata anggaran.

Tabel 31. Revisi Dipa TA. 2021 Ke-3

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp) Dipa Awal	Menjadi (Rp)
005.01.01				
1066.EAA	1.	511111	2.394.735.000	2.394.735.000
	2.	511119	50.000	50.000
	3.	511121	179.084.000	179.084.000
	4.	511122	53.991.000	53.991.000
	5.	511123	40.320.000	40.320.000
	6.	511124	4.120.690.000	4.120.690.000
	7.	511125	716.582.000	716.582.000
	8.	511126	146.978.000	146.978.000
	9.	511129	571.824.000	571.824.000
	10.	511151	60.655.000	60.655.000
	11.	521111	596.104.000	584.506.000
	12.	521114	6.300.000	6.084.000
	13.	521115	57.960.000	50.172.000
	14.	521119	38.190.000	65.214.000
	15.	521131	4.000.000	21.647.000
1066.EAC	16.	521241	5.000.000	5.000.000
	17.	521811	47.040.000	42.840.000
	18.	521841	3.334.000	5.682.000
	19.	522111	180.300.000	180.300.000
	20.	522112	18.000.000	18.000.000
	21.	522113	14.400.000	14.400.000
	22.	522141	336.960.000	414.720.000
	23.	523111	80.000.000	108.000.000
	24.	523119	24.500.000	12.390.000
	25.	523121	107.380.000	107.793.000
	26.	524111	44.846.000	16.447.000
	27.	524113	4.800.000	600.000
	28.	524119	6.924.000	3.000
005.01.02				
1071.EAD	29.	532111	265.000.000	265.000.000
	Total		10.125.947.000,00	10.203.707.000,00

e. Revisi DIPA Ke-4 (Tanggal 01 Nopember 2021)

Terdapat penambahan nilai pagu pada Revisi DIPA 4. Revisi dilakukan karena adanya pagu minus dan penambahan belanja barang operasional lainnya.

Tabel 32. Revisi Dipa TA. 2021 Ke-4

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp) Dipa Awal	Menjadi (Rp)
005.01.01				
1066.EAA	1.	511111	2.394.735.000	3.250.240.000
	2.	511119	50.000	50.000
	3.	511121	179.084.000	219.765.000
	4.	511122	53.991.000	69.235.000
	5.	511123	40.320.000	40.320.000
	6.	511124	4.120.690.000	5.210.979.000
	7.	511125	716.582.000	641.275.000
	8.	511126	146.978.000	166.650.000
	9.	511129	571.824.000	542.735.000
	10.	511151	60.655.000	13.260.000
	11.	521111	596.104.000	584.506.000
	12.	521114	6.300.000	6.084.000
	13.	521115	57.960.000	50.172.000
	14.	521119	38.190.000	90.514.000
	15.	521131	4.000.000	21.647.000
1066.EAC	16.	521241	5.000.000	5.000.000
	17.	521811	47.040.000	42.840.000
	18.	521841	3.334.000	5.682.000
	19.	522111	180.300.000	180.300.000
	20.	522112	18.000.000	18.000.000
	21.	522113	14.400.000	14.400.000
	22.	522141	336.960.000	414.720.000
	23.	523111	80.000.000	108.000.000
	24.	523119	24.500.000	12.390.000
	25.	523121	107.380.000	107.793.000
	26.	524111	44.846.000	16.447.000
	27.	524113	4.800.000	600.000
	28.	524119	6.924.000	3.000
005.01.02				
1071.EAD	29.	532111	265.000.000	265.000.000
	Total		10.125.947.000,00	12.098.607.000,00

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2021.

- a. Jurnal Penyesuaian.

- Pada tanggal 01 Januari 2021 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu (2020).
- Pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran 2021.

- b. Jurnal Umum.

Pada tanggal 30 September 2021 telah dilakukan jurnal umum sebagai berikut :

Akun 595112	Debet	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
-------------	-------	---

Akun 132211	Kredit	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
-------------	--------	--------------------------------------

Dengan keterangan Belanja Modal Dibawah Nilai Kapitalisasi

4. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN1/43/KP.04.6/1/2021 tanggal 04 Januari 2021, Tentang Penunjukkan Pejabat / Pegawai Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. DJOKO PRIJONO, S.E., jabatan Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran;
2. SRI REDJEKI TJATUR HANDAYANI, jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (PPSPM);
3. ENDAH SUSILORINI, S.E., jabatan Jurusita Pengganti diperbantukan pada Sub Bagian Umum & Keuangan selaku Bendahara Pengeluaran (Bendahara Negara Tersertifikasi / BNT);
4. WACHID., jabatan Jurusita Pengganti diperbantukan pada Sub Bagian Umum & Keuangan selaku Bendahara Penerimaan / Pengelola PNB (Bendahara Negara Tersertifikasi / BNT);
5. NINA OKTAVIANI, S.E. jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur selaku Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai / PPABP;
6. HERNOWO ADI, S.H., jabatan Panitera Pengganti Diperbantukan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pengelola Keuangan (Operator SAIBA);

LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021

KODE	URAIAN	SAT UAN	KUA NTIT AS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2021	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOTAL AK. PENYUSUTAN S.D PER 31 DESEMBER 2021	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2021
132111	PERALATAN DAN MESIN		805	3.040.270.637	2.538.860.619	144.617.598	-2.675.000	2.680.803.217	359.467.420
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	7	563.939.941	563.939.941	0	0	563.939.941	0
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	126	293.441.208	262.726.708	6.733.000	-2.675.000	266.784.708	26.656.500
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	511	719.080.046	658.465.546	10.918.000	0	669.383.546	49.696.500
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	18	85.397.936	35.576.536	7.770.400	0	43.346.936	42.051.000
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	6	41.726.808	41.726.808	0	0	41.726.808	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	93	1.092.479.940	791.383.190	95.349.550	0	886.732.740	205.747.200
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	44	244.204.758	185.041.890	23.846.648	0	208.888.538	35.316.220
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		11	8.544.455.000	973.450.018	258.492.466	-68.726.385	1.163.216.099	7.381.238.901
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	3	7.842.869.000	811.113.620	231.746.748	0	1.042.860.368	6.800.008.632
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	7	672.954.000	159.699.239	25.992.244	-68.726.385	116.965.098	555.988.902
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	28.632.000	2.637.159	753.474	0	3.390.633	25.241.367
134113	JARINGAN		3	132.750.000	43.099.997	4.116.666	0	47.216.663	85.533.337
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		1	23.000.000	6.612.000	575.000	0	7.187.500	15.812.500
5.04.01	JARINGAN AIR MINUM		1	95.750.000	35.512.497	3.191.666	0	36.704.163	59.045.837
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	14.000.000	2.975.000	350.000	0	3.325.000	10.675.000

166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		19	642.246.408	125.359.408	19.636.110	71.401.385	216.396.903	425.849.505
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	2	52.300.000	52.300.000	0	0	52.300.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	6	2.675.000	0	0	2.675.000	2.675.000	0
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	1	759.000	759.000	0	0	759.000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	5	72.300.408	72.300.408	0	0	72.300.408	0
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	5	514.212.000	0	19.636.110	68.726.385	88.362.495	425.849.505
TOTAL				12.359.722.045	3.680.770.042	426.862.840	0	4.107.632.882	8.252.089.163

